

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Untuk melihat pembaharuan dalam penelitian, tentu penting adanya tinjauan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembandingan dari sistematika dan pembahasan yang dibahas dalam penelitian, sehingga penelitian terdahulu juga dapat menambah khazanah teori bagi peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang kebijakan peningkatan produktivitas tanaman pangan sebagai berikut.

Penelitian pertama membahas tentang peningkatan produktivitas tanaman pangan dengan memanfaatkan pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya atau P4S dalam artian pusat pelatihan ini merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk menyuluhkan dan melatih petani. Menurut Budi Darma Putra dan Muhammad Sidiq (Putra & Sidiq, 2022) menyatakan bahwa peran dari organisasi penyuluhan pertanian ini memberikan dampak yang baik dalam peningkatan hasil tanam. Bimbingan teknis dan penyuluhan yang diberikan oleh lembaga P4S ini mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait peningkatan tanaman pangan, dan juga petani mampu menerapkan pengetahuan tersebut di dalam proses penanaman tanaman pangan.

Penelitian yang kedua menyatakan bahwa pembangunan pertanian melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Menurut Yennita Sihombing (Yennita Sihombing, 2022) mengatakan bahwa permasalahan dalam kebijakan pertanian dapat diatasi melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Pemanfaatan inovasi teknologi mampu meningkatkan produksi dari tanaman pangan dan juga meningkatkan pendapatan yang didapatkan oleh petani, jika penerapan inovasi teknologi ini dapat dilaksanakan dengan baik maka ketahanan pangan juga akan semakin meningkat. Akan tetapi perlu adanya sinergi dengan lembaga terkait dan juga sumber daya manusia yang mempunyai di bidang pertanian.

Penelitian ketiga membahas tentang upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di daerah

Kabupaten Sampang. Menurut Ahmad Fahrul Fausi dan Nihayatus Sholichah (Ahmad Fahrul Fausi, Nihayatus Sholichah, 2024) menyatakan bahwa program peningkatan kesejahteraan petani melalui program bantuan benih padi mampu meningkatkan hasil dari padi petani. Sinergi dari berbagai pihak mampu meningkatkan produksi tanaman padi, dengan pemerintah menyediakan bantuan benih melalui kelompok tani mampu mengakomodir dengan baik bantuan benih tersebut, sehingga petani merasakan dampak dari pembagian bantuan benih padi tersebut.

Penelitian keempat menyatakan bahwa peningkatan produksi tanaman pangan bisa didukung dengan infrastruktur yang baik, dalam hal ini adalah pembangunan sumur pertanian untuk mengairi sawah, dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro di Desa Lengkong. Menurut Jemi Hendriawan (Jemi Hendriawan, 2023) pelaksanaan program sumur pertanian ini mampu meningkatkan produksi pertanian padi di Desa Lengkong Kabupaten Bojonegoro. Sehingga peningkatan produksi tanaman pangan dapat dipengaruhi oleh infrastruktur yang mempunyai.

Penelitian kelima membahas tentang upaya pengendalian hama tanaman padi di Kabupaten Karawang sehingga mampu meningkatkan produksi tanaman padi. Menurut Rizki Azhar (Azhar et al., 2021) upaya dalam pengendalian hama tanaman padi harus diawasi dan dibimbing oleh dinas terkait. Tidak hanya memberikan pestisida kepada petani saja, akan tetapi petani harus difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang baik. Dinas terkait juga harus membimbing dan mengawasi penggunaan pestisida oleh petani, pestisida harus diberikan dengan tepat dosis yang harus digunakan agar pestisida tidak mempengaruhi hasil petani, yaitu tanaman padi.

Penelitian keenam membahas tentang upaya mempertahankan ketahanan pangan melalui skema pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Gowa. Menurut Nur Danil K (Danil, 2023) menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana dari pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Gowa harus dikelola dengan baik dan tersedia, khususnya pabrik beras. Sarana dan prasarana harus bisa diakses oleh

masyarakat. Peran dari dinas terkait juga harus diperhatikan seperti mengatasi hambatan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan cadangan pangan.

Penelitian ketujuh membahas tentang bagaimana ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang ada di China terutama masa depan pertanian di China. Menurut Matthew Gaudreau (Gaudreau, 2019) mengatakan bahwa di China memiliki karakteristik tersendiri terdapat pertentangan antara kebijakan pemerintah dan juga aktor bisnis, serta masyarakat akan tetapi memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan ketahanan pangan di China dari perusahaan asing. Seperti penerapan *colaborrative govermant* sinergi antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat mampu menghasilkan ketahanan pangan yang baik. Pihak swasta memiliki peran yang cukup penting dalam mempertahankan ketahanan pangan suatu negara.

Penelitian kedelapan membahas tentang kebijakan subsidi pertanian yang diterapkan di desa miskin di China. Menurut Chengyou Li (Li et al., 2022) menyimpulkan bahwa subsidi pertanian mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian, akan tetapi subsidi ini harus memperhatikan kondisi dari geografis, benih dan ekonomi di wilayah petani tersebut sehingga mempengaruhi hasil pertanian petani di China.

Penelitian kesembilan membahas tentang pembahasan tentang konteks ketahanan pangan harus bisa menjadi dukungan dari negara untuk sistem pertanian, pada penelitian ini terjadi di Samara, Rusia. Menurut K.A. Zhichkin menyimpulkan bahwa negara harus mampu hadir di dalam perkembangan sistem pertanian bagi masyarakat khususnya petani. Negara harus mengoptimalkan subsidi pertanian dan harus ditingkatkan agar mampu menunjang ketahanan pangan.

Penelitian kesepuluh membahas tentang algoritma kebijakan ketahanan pangan di Ukraina. Menurut Iryna Koshkalda (Koshkalda et al., 2020) menyimpulkan bahwa kebijakan ketahanan pangan harus bersifat komperhensif dan juga harus terintegrasi dengan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Serta tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

## 2.2. Evaluasi Kebijakan

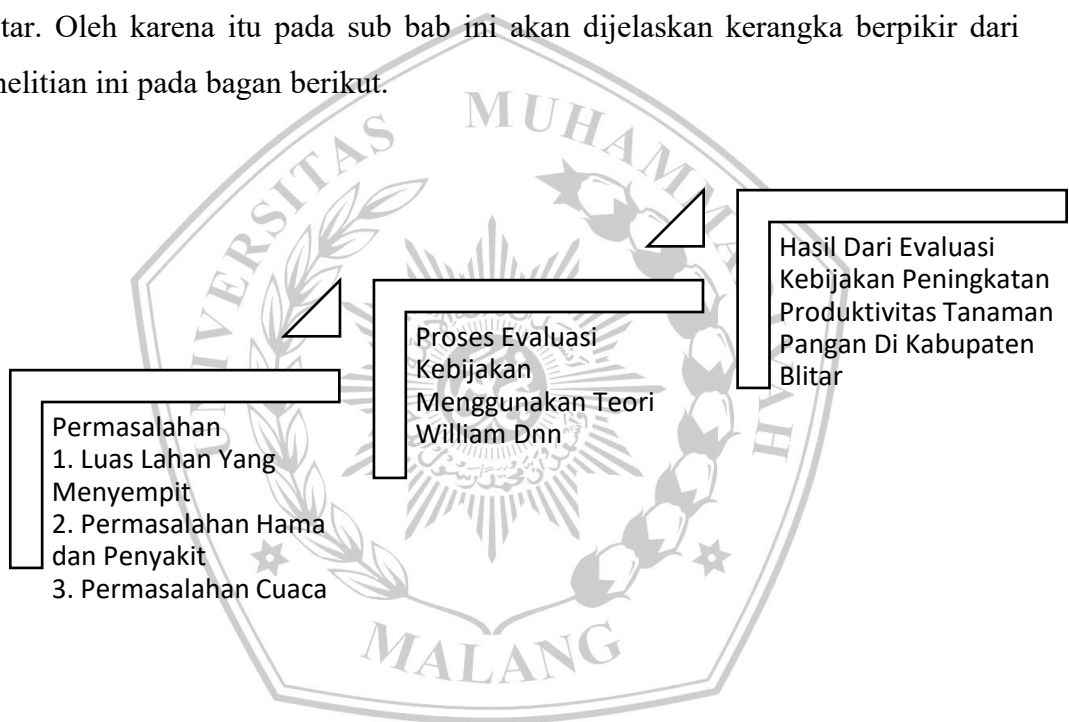
Dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tidak lepas dari proses evaluasi kebijakan. William Dunn (W. N. Dunn, 1998) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses menentukan tujuan, memberikan nilai, dan memberikan klasifikasi terkait dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan manfaat terkait informasi yang valid dan benar berkaitan dengan jalannya pelaksanaan kebijakan, sehingga masyarakat mampu menilai apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Evaluasi kebijakan berperan dalam memberikan kritik akan jalannya kebijakan, sehingga nantinya diharapkan kebijakan tersebut mampu berjalan sesuai dengan tujuan. Kemudian hasil dari evaluasi kebijakan dapat memberikan rekomendasi dan merumuskan masalah terkait kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan harus dilaksanakan beruntutan mulai dari awal sampai akhir dari proses kebijakan, tidak hanya dilihat dari akhir saja (Rantung, 2024). Menurut Lester dan Stewart dalam Rantung (Rantung, 2024) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut dan juga menggambarkan apakah kebijakan tersebut dinilai berhasil atau gagal.

Menurut Affrian (Affrian, 2020) dalam Warman (Warman et al., 2023) mengatakan bahwa proses evaluasi kebijakan merupakan sebuah langkah untuk menilai konteks, pelaksanaan dan juga dampak dari kebijakan yang dibuat. Untuk menilai kebijakan tersebut tentunya terdapat kriteria kriteria yang perlu diperhatikan, menurut William Dunn terdapat 6 kriteria yang dapat menjadi acuan dalam penilain kebijakan antara lain :

1. Efektivitas Kebijakan, dalam kriteria ini ditujukan untuk melihat apakah hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang dicapai.
2. Efisiensi Kebijakan, dalam kriteria ini untuk mengukur proses yang diperlukan dalam menggapai hasil yang harus dicapai.
3. Kecukupan kebijakan, untuk mengukur pencapaian yang dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut.
4. Perataan Kebijakan, untuk mengukur biaya dan manfaat yang diklasifikasikan sesuai dengan tujuan kebijakan.

5. Responsivitas Kebijakan, untuk mengukur kepuasan dan penilaian dari objek kebijakan
6. Ketepatan Kebijakan, untuk mengukur ketepatan kebijakan apakah memiliki hasil atau guna dari kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang digaungkan oleh William Dunn. Evaluasi kebijakan ini untuk mengukur kebijakan peningkatan produktivitas tanaman pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar guna untuk mencukupi ketersediaan pangan agar dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Blitar. Oleh karena itu pada sub bab ini akan dijelaskan kerangka berpikir dari penelitian ini pada bagan berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

### 2.3. Peningkatan Produktivitas Pangan

Peningkatan produktivitas tanaman pangan memiliki posisi yang sangat sentral dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan karena dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Terlebih lagi ancaman krisis global juga dapat mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan di dunia, sehingga diupayakan gerakan produktivitas tanaman pangan digalakan mulai di daerah. Produktivitas pangan

adalah ukuran efisiensi produksi pangan yang dapat dilihat dari rasio antara output (hasil panen) dan input (sumber daya yang digunakan). Produktivitas pangan yang tinggi menunjukkan bahwa produksi pangan dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit atau menghasilkan output yang lebih banyak. Produktivitas pangan yang rendah, sebaliknya, menunjukkan bahwa produksi pangan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak atau menghasilkan output yang lebih sedikit (Ulma, 2017).

Produktivitas pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada, inovasi teknologi, infrastruktur pertanian, pemasaran dan nilai tambah hasil pertanian, kebijakan dan regulasi yang mengatur pertanian, serta keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Faktor eksternal meliputi kondisi iklim dan cuaca suatu wilayah, perubahan sosial-ekonomi dalam masyarakat, persaingan global dalam distribusi hasil pertanian, serta ancaman hama dan penyakit (Wityasari, 2021).

Produktivitas tanaman pangan sangatlah penting untuk ditingkatkan dikarenakan jika tanaman pangan meningkat maka kesejahteraan petani akan semakin menjadi baik. Kemudian hasil dari tanaman pangan yang meningkat dapat mencukupkan ketahanan pangan. Ketersediaan bahan pangan akan tercukupi sehingga masyarakat mampu mengakses dengan baik hasil pangan yang ada (N. L. P. R. Dewi et al., 2017).

#### **2.4. Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana tersedianya kebutuhan pangan baik secara kualitas maupun kuantitas bagi kebutuhan rumah tangga bagi setiap orang (UU 7, 1996). Menurut Ermawati Dewi (E. Dewi, 2018) mengatakan bahwa konsep ketahanan pangan merupakan ketersediaan bahan pangan yang utama dengan kualitas yang memadai dan memiliki akses yang dapat diakses oleh semua pihak. Ketahanan pangan juga dapat diartikan ketika kebutuhan pangan nasional atau individu terpenuhi, dimana ketahanan pangan dicerminkan dengan ketersediaan pangan baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga menjamin

ketersediaan pangan yang baik akan tetapi tidak berseberangan dengan norma agama dan keyakinan ataupun budaya yang dianut di masyarakat (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012, 2012). Kemudian menurut "Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015" menjelaskan bahwa tersedianya pangan yang cukup dengan mutu yang baik serta memiliki gizi dan dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan gaya hidup yang sehat dan mampu melakukan produktivitas setiap saat.

Ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang cukup dan bergizi, mengatur harga yang wajar bagi masyarakat agar dapat mengaksesnya setiap saat, menambah nilai dan daya saing dari komoditas pangan, mengantisipasi kerawanan pangan, memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan pangan yang bermutu, peningkatan kesejahteraan bagi pelaku ketahanan pangan, dan mengembangkan sumber daya pangan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012, 2012). Tentunya perlu dengan dukungan dari berbagai *stakeholder* untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Nurani Wityasari (Wityasari, 2021) terdapat aspek aspek yang mempengaruhi ketahanan pangan, antara lain, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ini tercermin dari kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, kualitas pangan tersebut harus bernutrisi dan juga memiliki gizi yang baik untuk dikonsumsi masyarakat. Aspek selanjutnya adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan tersebut, masyarakat harus bisa secara mudah untuk mengakses hasil pangan yang bergizi. Akses tersebut harus dibarengi dengan kondisi ekonomi yang baik bagi masyarakat. Aspek yang terakhir adalah keamanan pangan, pangan harus aman memiliki kualitas serta jumlah yang aman untuk di konsumsi.